

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DI KOTA TANJUNGPINANG**

**Oleh**

**Maharani Azzahra**

**NIM. 2105010055**

## **Abstrak**

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia tergolong tinggi, termasuk di Kota Tanjungpinang, jumlah pelanggaran lalu lintas tinggi menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. ETLE hadir sebagai solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengurangi praktik pungutan liar. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan program ETLE dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ETLE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian pengemudi yang melanggar lalu lintas dan petugas penegak hukum ETLE. Lokasi penelitian berada di POLDA Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan Kepulauan Riau, dan SAMSAT Kota Tanjungpinang. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi hasil awal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Hambatan meliputi koordinasi lintas instansi yang lemah antara kepolisian, Dinas Perhubungan, dan SAMSAT, Infrastruktur teknologi yang belum memadai, seperti jaringan internet tidak stabil, jangkauan kamera terbatas, dan kapasitas server penyimpanan data yang minim, turut memperlambat dan mengurangi efektivitas perekaman serta validasi data. Selain itu, kesenjangan kompetensi SDM di kalangan petugas dalam mengelola perangkat dan sistem digital ETLE, ditambah dengan pelatihan yang masih dasar, menyebabkan operasional kurang efisien.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, *Electronic Traffic Law Enforcement, E-Government*

*IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC TRAFFIC LAW  
ENFORCEMENT (ETLE) PROGRAM POLICY IN TANJUNGPINANG CITY*

*Oleh*

*Maharani Azzahra*

*NIM. 2105010055*

*Absstract*

*Traffic violations in Indonesia, including in Tanjungpinang, cause congestion and accidents. ETLE is present as a technology-based solution to improve traffic law enforcement, transparency, and accountability, as well as reduce illegal levies. This policy is also in line with government efforts to develop. his study uses a qualitative approach with research objects being traffic violators and ETLE law enforcement officers. The research location is at the Traffic Unit of Polresta Kota Tanjungpinang. Data sources come from primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique refers to the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification of initial results showing that the implementation of ETLE in Tanjungpinang still faces challenges, such as a lack of public understanding of the ETLE system, which is still considered a "regular road CCTV camera," limited socialization, and not all officers fully understand Standard Operating Procedures (SOPs), especially their technical aspects. Nevertheless, this policy has a strong legal basis and aims to reduce the number of violations and increase public compliance. Factors such as policy standards and targets, resources, characteristics of the implementing organization, inter-organizational communication, implementer attitudes, as well as the social, economic, and political environment have a significant influence on the success of this policy's implementation.*

*Keywords : Policy Implementation, Electronic Traffic Law Enforcement, E-Government*